

PEMBELAJARAN YANG DEMOKRATIS DI MADRASAH

Oleh. Ahmad Imran Syuaib, M.Pd.I
Dosen STAI As'adiyah Sengkang

Abstract

Dalam era globalisasi kesadaran akan identitas pribadi maupun persekutuan semakin menonjol. Hal ini merupakan suatu "paradoks". Sebab ketika dunia semakin menyatu, semakin mejemuk pula bentuk-bentuk ekspresinya. kemajemukan merupakan kenyataan sosiologis yang tidak dapat dihindari. Ditengah manfaatnya proses globalisasi yang ternyata juga memperkuat kemajemukan dalam kehidupan masyarakat, pendidikan memiliki perang penting dalam mentransformasikan nilai-nilai yang positif-konstruktif sehingga masyarakat tidak kaku dalam menghadapinya. Dalam konteks inilah pendidikan Islam memiliki tradisi panjang dalam berhadapan dengan isu-isu demokrasi.

Keyword; belajar, mengajar, demokrasi, dan madrasah.

I. Pendahuluan

Pendidikan Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan Islam sebagai agama samawi terakhir yang di bawah oleh Muhammad Saw. Pada masa pertumbuhan, yakni ketika rasul menerima wahyu pertama dilanjutkan wahyu kedua, proses kependidikan¹ dipahami untuk menyampaikan informasi kebenaran Islam sebagai agama baru masih terbatas pada keluarga terdekat selanjutnya para sahabat.² Setelah dilakukan selama lebih kurang tiga tahun, proses penyebaran Islam dilakukan dengan cara terang-terangan dan meninggalkan cara sembunyi-sembunyi yang selama ini dilakukan. Cara terang-terangan ini pada mulanya ditujukan kepada kerabat, penduduk Mekah yang beraneka ragam golongan masyarakat, kemudian para suku (kabilah) Arab yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah Haji. Proses ini terus berkembang seiring sejalan dengan upaya untuk menyebarkan ajaran Islam.³

Dengan munculnya pergerakan nasional, tokoh-tokoh muslim yang tertarik dengan dunia pendidikan yang bergaya Barat, mengusahakan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan mengadakan perubahan sistem.⁴ Namun kecenderungan madrasah pada akhir-akhir ini sebagai media pengukuhan status sosial budaya ini berhubungan dengan munculnya berbagai bentuk konflik dan tawuran antar geng dan kelompok sosial, atau antar sekolah yang tampak kurang menjadi perhatian pemerintah. Diperlukan kebijakan pendidikan demokratis yang terbuka bagi semua orang dengan mengembangkan madrasah sebagai wahana pengkayaan pengalaman hidup dan kompetisi sehat melalui sistem evaluasi berorientasi personal merupakan sebagian dari usaha sistematis membuka lembaga pendidikan bagi semua orang dan semua status. Tanpa usaha sistematis dan evaluasi personal, sekolah adalah sebuah takdir tentang pengukuhan status di mana orang miskin akan tetap miskin dengan ongkos pendidikan lebih mahal dan kemungkinan gagal studi.

Karena itu tugas pemerintah bukan hanya mengurus sekolah negeri atau murid dan mahasiswa negeri yang tanpa disadari meletakkan anak-anak sekolah swasta sebagai warga kelas dua. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan khusus sekolah swasta, hingga tidak tumbuh "budaya tandingan" dari murid dan mahasiswa, guru, dosen, dan pegawai swasta. Tanpa kebijakan fungsional maka akan muncul kesenjangan. Sekolah pejabat dan orang kaya, sekolahnya artis, pribumi atau etnis lain, menjadikan sekolah pelestari konflik dan kesenjangan sosial.⁵

Pendidikan lebih berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, instrumen ideologi dan alat produksi kelas berkuasa dan kaum kapitalis. Sementara rakyat seringkali harus membayar biaya hidup dan pendidikan jauh lebih mahal dari pada kelas atas dan orang-orang kaya. Orang-orang miskin tidak mempunyai banyak pilihan kecuali sekolah bermutu rendah, murah dan dekat tempat tinggal. Fasilitas belajar anak-anak miskin itu pun hampir nihil.

Pendidikan bukanlah sekedar sebuah *transfer of knowledge* dan atau *transfer of value*, karena model pendidikan ini hanya akan membuat sejarah berhenti dan kebudayaan menjadi mati. Model pendidikan yang hanya beroperasi sebagai pemindahan teori IPTEK dan nilai akan menciptakan masyarakat nepotis dan kolusif sebagai pelestari kekuasaan

yang korup. Hal ini akan menempatkan pendidikan sebagai industri nilai yang telah gagal berfungsi dan sekedar menjadi sebuah pasar dari sebuah kekuatan borjuis dan kelas kapitalis.

Mengingat demikian urgennya pendidikan Islam yang berbasis demokrasi, maka tela'ah di atas menjadi hal yang sangat penting untuk diwacanakan tentunya dalam kerangka akademik. Sudah dipastikan bahwa ketika wacana tersebut mengemuka, maka permasalahan yang menyertainya adalah;

1. Bagaimana penanaman sikap demokrasi dalam sistem madrasah.
2. Bagaimana proses belajar mengajar dimadrasah yang berbasis demokrasi.

II. Penanaman Sikap Demokratis dalam Sistem Madrasah

Pada era modern madrasah masih tetap hidup. Namun demikian, eksistensinya menjadi dipertanyakan ketika kurikulumnya masih dimonopoli oleh *ul-m al-naqliyah*. Karena posisi madrasah yang menaruh jarak dengan sains modern itulah makna madrasah sering disebut lembaga tradisional. Kurikulum madrasah yang sering membatasi diri pada ilmu-ilmu agama agaknya mengancam eksistensinya sendiri.⁶ Meskipun demikian, jika dilakukan penyesuaian dengan kecenderungan pendidikan modern, madrasah masih tetap dituntut untuk menampilkan cirinya sendiri yang memperhatikan ilmu-ilmu agama secara lebih proposional. Madrasah dalam era modern berada dalam tarik menarik antara keharusan mempertahankan pengajaran ilmu-ilmu agama secara modern di satu pihak, dan mengembangkan pengajaran ilmu-ilmu non keagamaan di lain pihak. Sikap madrasah yang terlalu konservatif akan mendorong lembaga itu terasing (terisolasi) dan bahkan lenyap dari perkembangan modern. Sebaliknya sikap akomodatif yang berlebihan terhadap kecenderungan pendidikan modern (sekular) juga akan menjerumuskan madrasah kedalam sistem pendidikan yang lepas dari nilai-nilai keislaman. dari situlah menurut penulis perlunya penanaman sikap demokratisasi dan liberalisasi dalam mengaplikasikan sistem madrasah.

Sistem pendidikan Islam di madrasah senang tiasa menjadi jantung, pusat kehidupan, peradaban Islam sebagai salah satu tonggakannya sebab ia tidak dapat dipisahkan dari tradisi itu sendiri yang membentuk tulang punggung keseluruhan peradaban Islam.⁷ Kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi modern, terutama teknologi komunikasi elektronik dan teknologi komputer yang sangat pesat pada penghujung abad XX memasuki abad XXI, Milenium III, telah mengantar dunia dari masyarakat modern menjadi masyarakat informasi, yang menyebabkan dunia mengalami perubahan drastis dan mengalami proses transformasi globalisasi.⁸

Upaya peningkatan mutu madrasah merupakan tuntutan yang makin mendesak dan tidak dapat dihindari. Era pasar bebas yang akan mulai bergulir tahun 2003 menuntut "kemampuan bersain" dari SDM kita. Kemampuan bersain hanya mungkin muncul bila kita "berkualitas". Untuk memberi gambaran madrasah pada masa depan, maka perlu dirumuskan gambaran tentang visi madrasah dalam alam globalisasi. Visi madrasah tersebut adalah menjadi madrasah sebagai "sekolah plus" yang berkualitas, berkarakter dan mandiri", Madrasah plus adalah madrasah yang menyiapkan anak didik mampu dalam sains dan teknologi, namun tetap dengan identitas keislamannya. Ini sesuai dengan konsep madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islam.⁹

Dalam upaya peningkatan kualitas tersebut, dunia pendidikan Islam masih membahas dengan "kualitas guru" yang belum memadai. Keadaan ini lebih menonjol setelah ditetapkan kurikulum 1994, di mana kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah umum yang setingkat, plus ciri khas Islam untuk tingkat madrasah. Saat ini guru dalam kategori layak hanya sekitar 20% sedangkan untuk kategori salah kamar (*mismatch*) 20 % dan sisanya 60 % masih dalam kategori belum layak. Ini tantangan berat yang harus dihadapi dunia madrasah yang bermutu lebih rendah dibanding dengan sekolah umum yang setingkat di Dikbud.¹⁰

Dalam pada itu berbagai sistem pendidikan yang dapat dilihat di antaranya:

1. Berdirinya lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini pesantren dan *Madrasah Diniyah* atau semacamnya diprioritaskan pada studi keagamaan dengan "ilmu agama" tertentu. Tetapi mata pelajaran yang ada di dalamnya tidak dapat memenuhi harapan agar umat Islam dapat eksis sebagai khalifah dalam berbagai aspeknya.
2. Sesungguhnya sistem atau pola pemikiran pertama sudah berjalan, tetapi arus modernisasi semakin hari semakin kuat.

Sebagian umat Islam melihat kalau sistem pendidikan yang ada tidak dapat di andalkan memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan material. Karenanya. Sebagian umat Islam berusaha meniru sistem pendidikan yang sudah tersebar didunia Barat. Sehingga di Indonesia muncul Istilah Madrasah Aliyah Umum (MAU), Madrasah Aliah Negeri Program Khusus (MANPK), dan sebagainya.

3. Berpendirian bahwa sistem pendidikan model Barat yang tidak memperhatikan "Ilmu Agama Islam" dan Sistem Pendidikan Islam yang tidak peduli terhadap "Sistem Modern" harus diubah dan diperbaharui, karena sistem pendidikan Barat akan hanya menghasilkan manusia intelek yang kurang/tidak tahu tentang agama dan berorientasi keduniaan (bersifat Pragmatis). Sedangkan sistem pendidikan Islam secara tradisional akan dapat menghasilkan "ulama" yang kurang tahu mengenai politik dan urusan keduniaan. Padahal manusia yang diharapkan Islam adalah manusia yang sempurna (bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat).
4. Agaknya, pembaharuan yang ada dengan melalui beberapa sistem seperti yang telah dikemukakan, belum dapat memenuhi harapan umat Islam. Hal tersebut disebabkan sistem pendidikan Islam yang ada masih menampakkan adanya dualisme pendidikan antara sekolah dan Madrasah, antara Perguruan Tinggi Islam dan Perguruan Tinggi Umum. Di samping itu masih menampakkan pula adanya dikotomi ilmu, antar "Ilmu Agama" dan "Ilmu Umum".¹¹

Dengan paradigma tersebut menurut penulis perlu di adakan reformasi atau pembaharuan sistem, di antaranya rekonstruksi secara komprehensif integratif. Sehingga pada suatu saat tidak ada disintegrasi antara sistem sekolah dan madrasah atau keduanya tersingkronisasi (menyatu).

Sistem pendidikan yang mapan selama ini di madrasah dapat diandaikan sebagai sebuah "bank" (banking concept of education) di mana pelajar diberi ilmu pengetahuan agar ia kelak dapat mendatangkan hasil dengan lipat ganda. Jadi anak didik adalah obyek infestasi dan sumber deposito potensial. Mereka tidak berbeda dengan komoditi ekonomis lainnya yang lasim dikenal. investornya adalah para guru yang

mewakili lembaga-lembaga pasyarakatatan mapan dan berkuasa, sementara depositonya adalah berupa ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada anak didik. Anak didik pun lantas dapat diperlakukan sebagai "bejana kosong" yang akan diisi, sebagai sarana tabungan atau penanaman "modal ilmu pengetahuan" yang akan dipetik hasilnya kelak. Jadi, guru adalah subyek aktif, sedang anak didik adalah obyek pasif yang penurut, dan diperlakukan tidak berbeda atau menjadi bagian dari realitas dunia yang diajarkan kepada mereka, sebagai obyek ilmu pengetahuan teoretis yang tidak berkesadaran. Pendidikan akhirnya bersifat negatif di mana guru memberi informasi yang harus ditelan oleh murid, yang wajib diingat dan dihapalkan.¹² Secara sederhana Freire menyusun daftar antagonisme pendidikan "gaya bank" itu sebagai berikut:

1. Guru mengajar, murid belajar,
2. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa,
3. Guru berpikir, murid dipikirkan,
4. Guru bicara, murid mendengarkan,
5. Guru mengatur, murid diatur,
6. Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti,
7. Guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri.
8. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya
9. Guru adalah subyek proses belajar, murid obyeknya.¹³

Oleh karena guru menjadi pusat segalanya, maka merupakan hal yang lumrah saja jika murid-murid kemudian mengidentifikasi diri seperti gurunya sebagai manusia ideal yang harus ditiru, harus diteladani dalam semua hal. Freire menyebut pendidikan semacam itu menciptakan "nekrofilia" dan bukannya melahirkan "biofilia" implikasinya lebih jauh adalah bahwa pada saatnya nanti murid akan benar-benar menjadikan diri mereka sebagai duplikasi guru mereka dulu, dan pada saat itulah akan lahir lagi generasi baru manusia-manusia penindas. Menurut Freire, sistem pendidikan sebaliknya (sistem demokratisasi) justru harus menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia.¹⁴

Pola pendidikan seperti yang pertama tadi (*banking concept of education*) hanya akan mampu merubah "penafsiran" seseorang terhadap

situasi yang dihadapinya, namun tidak akan mampu merubah realitas pada dirinya sendiri.

Pembelajaran pendidikan agama Islam yang selama ini berlangsung agaknya kurang terasa terkait atau kurang concern terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi "makna" dan "nilai" yang perlu di internalisasikan dalam diri peserta didik, untuk selanjutnya menjadi sumber motivasi bagi peserta didik untuk bergerak, berbuat dan berperilaku secara kongkret-agamis dalam kehidupan praktis sehari-hari.¹⁵

Pada era globalisasi ini para siswa menghadapi kekuatan global yang hendak membentuk dunia masa kini dan masa depan, yaitu; *Pertama*, kemajuan IPTEK dalam bidang informasi serta inovasi-inovasi baru di dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia; *Kedua*, masyarakat yang serba kompetitif; *Tiga*, meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia serta kewajiban manusia dalam kehidupan bersama, dan semakin meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi. Semuanya itu akan berpengaruh juga pada kurikulum dan model pengembangan pendidikan agama yang akan disajikan kepada peserta didik.¹⁶

Tujuan pendidikan seharusnya dirancang agar para murid nanti secara kreatif mampu mengkonstruksi nilai moral dan teori IPTEK yang fungsional bagi masalah hidupnya sendiri, bukan pengalaman dimasa lalu dari sang guru, orang tua dan penguasa. Sehingga mengusung nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan sangat penting. Karena tidak ada suatu sistem nilai, teori, pembelajaran dan evaluasi yang berlaku disemua zaman dan bagi semua masyarakat.

III. Proses Belajar Mengajar di Madrasah yang Berbasis Demokrasi

Konsep tentang Islam dan demokrasi telah mulai mendapat tempat signifikan dalam pendidikan politik Islam modern. Dalam upaya untuk menemukan suatu basis ideologis yang diterima oleh semua kalangan di dunia Islam, para pemikir dari berbagai kalangan masyarakat muslim mulai merambah misi baru untuk merekonsiliasi perbedaan perbedaan antara berbagai kelompok. Padahal menurut penulis Islam dan demokrasi saling memperkuat bahkan di dalam ajaran Islam terdapat nilai-nilai demokrasi.

Ada dua hal yang menjadi dilema di dalam pendidikan Islam. Pertama, berkaitan dengan elemen-elemen fenomenologis yang mengundang perdebatan apakah Islam *compatible* (cocok) dengan demokrasi atau tidak. Yang kedua, berkaitan dengan akar-akar demokrasi dalam pengalaman Islam.¹⁷

Bagi sebagian kalangan, terutama dalam lingkungan akademis dan media Barat, wacana mutakhir tentang Islam memunculkan keraguan serius mengenai kompatibilitas Islam dan demokrasi. Alasan yang kerap dikemukakan adalah, kaum *revitalis muslim* punya kelemahan dalam hal komitmen mereka terhadap pluralisme dan demokrasi. Akibatnya negara-negara dunia Islam selalu gagal dalam upaya membentuk suatu politik demokratis.

Berkaitan dengan pendidikan Paulo Freire, cendekiawan katolik dari Brazil ini begitu keras mengkritik sistem dan praktek pendidikan seperti gaya bank yang membelenggu akal dan nalar manusia pendidikan. Sejalan dengan prinsip demokrasi pendidikan Islam, pendidikan yang dikehendaki Paulo Freire adalah pendidikan yang menempatkan manusia pada posisi sentral dalam setiap perubahan yang terjadi serta mampu pula mengarahkan dan mengendalikan perubahan itu. Mencela jenis pendidikan yang memaksa manusia yang menyerah kepada keputusan-keputusan orang lain. Pendidikan yang di usulkan adalah pendidikan yang dapat menolong manusia untuk meningkatkan sikap kritis terhadap dunia dan dengan demikian mengubahnya.¹⁸

Kecenderungan Paulo Freire terhadap pendidikan di atas, tidak banyak berbeda dengan apa yang di ajarkan Nabi Muhammad saw, enam belas adab yang lalu: dengan konsepsi ajaran tauhid yang mulia serta praktek pendidikan dan dakwah Islam-nya yang begitu toleran terhadap perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan sahabat-sahabatnya. Beliau amat menghargai setiap perbedaan pendapat dari para sahabat , seperti perbedaan pendapat antara sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khatab.

Pendidikan merupakan kunci pembuka ke arah kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang maju dan kuat akan mempercepat terjadinya perubahan sosial. Namun jika pendidikannya yang mundur maka bisa dipastikan akan kontra produktif terhadap jalannya proses perubahan sosial, dan justru akan menimbulkan ketidak harmonisan tatanan sosial.

Berbicara dalam konteks pendidikan Islam Azyumardi Azra melontarkan suatu keprihatinan terhadap prestasi pendidikan Islam yang

masih menempati posisi marjinal. Azra menyatakan bahwa; dikarenakan pengelolaan yang secara umum kurang profesional, pendidikan Islam seringkali kalah bersaing dalam berbagai segi dengan sub sistem pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat lain . bukan rahasia lagi, bahwa citra dan gengsi lembaga pendidikan Islam sering dipandang sebagai subordinat dari pendidikan yang diselenggarakan pihak lain.¹⁹

Pendapat di atas memperlihatkan benang merah dari kelemahan besar yang diperlihatkan oleh lembaga pendidikan Islam yakni kelemahan manajerial, eksklusifitas dan rendahnya prestasi. Jika di amati, maka ketiga titik lemah tersebut, kesemuanya merupakan permasalahan yang sangat esensial.

Atmosfir reformasi yang mulai bergulir pada tahun 1998, tampaknya membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Politik pendidikan nasional berubah seiring dengan pergantian pemerintahan. Pada tanggal 7 mei 1999, presiden Habibie menandatangani Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Implementasi dari undang-undang tersebut meskipun belum bisa dilaksanakan sepenuhnya) akan segera mengubah secara drastis konsep penyelenggaraan negara. Dengan undang-undang ini, kabupaten dan kotamadya memiliki kewenangan yang sangat besar, termasuk dalam bidang pendidikan. Sebab dalam pasal 7 undang-undang no 22 tahun 1999 ini dinyatakan bahwa:

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang; politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain.

Dengan kata lain, salah satu imbas dari digulirkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, telah menggeser pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralistik menjadi pendidikan desentralistik.

Sebagai langkah awal dalam upaya membangun madrasah adalah bagaimana men-set ulang pola pikir para pengambil kebijakan dan pengelola lembaga pendidikan tersebut. Bagaimana peningkatan citra dan gengsi madrasah dengan instrumen prestasi? Bagaimana megubah pola manajemen? Serta bagaimana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga mereka merasa memiliki madrasah? Dengan kata

lain madrasah tidak terpisah dari masyarakatnya. Kesemuanya merupakan pertanyaan-pertanyaan krusial yang harus segera dijawab oleh para pengelola madrasah.

Tuntutan masyarakat terhadap pendidikan semakin tinggi seiring dengan tinkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan-perubahan zaman yang sangat cepat. Mukhtar Bukhari mengidentifikasi tiga kemampuan yang dituntut oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan, yakni (1) kemampuan untuk mengetahui pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan, (2) kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan yang sedang terjadi, dan (3) kemampuan untuk menyusun program penyesuaian diri yang akan ditempuh dalam jangka waktu tertentu. Adapun kegagalan untuk mengembangkan ketiga kemampuan tersebut akan mengakibatkan sistem pendidikan terperangkap ke dalam rutinitas.²⁰ Dua pendapat di atas setidaknya bisa dijadikan acuan dalam upaya menyiapkan komponen-komponen yang akan menjadi bekal bagi peserta didik atau out-put madrasah ketika mereka kembali ke pangkuan masyarakatnya.

IV. Penutup

Dalam rangka menanamkan sikap demokrasi dilingkungan pendidikan adalah seorang guru harus bersikap terbuka tanpa ada diskriminasi pada individu-individu (siswa) dan dan tidak hanya memandang siswa sebagai objek tetapi ia harus menganggap sebagai teman diskusi. Sehingga diharapkan para siswa nanti secara kreatif mampu mengkonstruksi nilai moral dan teori IPTEK yang fungsional bagi masalah hidupnya sendiri. Karena tidak ada suatu sistem nilai, teori, pembelajaran dan evaluasi yang berlaku disemua zaman dan bagi semua masyarakat.

Pendidikan telah disepakati bahwa ia memiliki peran besar dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin besar peluang seseorang untuk meningkatkan kualitas daya saing mereka. Beberapa ahli memandang, pendidikan bukan hanya sebagai variabel tertentu munculnya SDM yang berdaya saing tinggi, tetapi juga ikut menentukan terjadinya perubahan sosial (*al-Tagayyur al-Ijtima'i al-ijtib*). Pendidikan merupakan kunci

pembuka ke arah kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang maju dan kuat akan mempercepat terjadinya perubahan sosial.

Endnotes:

¹Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 3.

²Lihat Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam dalam Abad ke 21* (Cet. II; Jakarta: PT Alhusna Zikra, 2001), h. 13.

³Lihat Ismail SM, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* dalam buku Nurul Huda, *Madrasah Sebuah Perjalanan untuk Eksis* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 209.

⁴Lihat Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: PT. Alhusna Zikra, 2001), h. 115.

⁵Lihat Stevan M. Chan, *Education and The Democratic Ideal* diterjemahkan oleh Abdul Munir Mulkhan dan Umi Yawisah, *Pendidikan Liberal Berbasis Sekolah* (Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), h. xiv.

⁶*Ibid.*, h. 78.

⁷Lihat Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan*, *op. cit.*, h. 116.

⁸Lihat Mappanganro, "Rekonstruksi Lembaga Pendidikan Islam secara Kprehensif Integratif" *Makalah Seminar Regional dan Musyawarah Wilayah VII Forum Komunikasi Mahasiswa Tarbiyah Indonesia Timu*. Juni 2000, h. 3.

⁹Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 129.

¹⁰Lihat *ibid.*, h. 130.

¹¹Lihat *ibid.*, h. 4-5.

¹²Lihat Paulo Freire, *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation*, diterjemah oleh Agung Prihantoro, *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. xi.

¹³Lihat *ibid.*, h. xii.

¹⁴Lihat *ibid.*, h. xii.

¹⁵Lihat Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Cet. II; Bandung: PT. Remajah Rosdakarya, 2002), h. 168.

¹⁶Lihat *ibid.*, h. 186.

¹⁷Lihat Mun'im A. Sirry, *Dilema Islam dilema demokrasi pengalaman baru muslim dalam transisi Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Gugus Pres, 2002), h. 9.

¹⁸Lihat Paulo Freire, *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 176.

¹⁹Lihat Azyumardi Azrah, *op. cit.*, h. 60.

²⁰Lihat Mukhtar Bukhari, *Pendidikan dan Pembangunan* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h. 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Buchori, Muctar. *Pendidikan dan Pembangunan*. Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Chan, Stevan M. *Education and The Democratic Ideal* diterjemahkan oleh Abdul Munir Mul Khan dan Umi Yawisah, *Pendidikan Liberal Berbasis Sekolah*. Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.
- Freire, Paulo. *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation*, diterjemah oleh Agung Prihantoro, *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Ismail SM. *Dinamika Pesantren dan Madrasah* dalam buku Nurul Huda, *Madrasah Sebuah Perjalanan untuk Eksis*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Langgung, Hasan. *Asas-Asas Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: PT. Alhusna Zikra, 2001.
- Mappanganro. "Rekonstruksi Lembaga Pendidikan Islam secara Koprehensif Integratif" *Makalah Seminar Regional dan Musyawarah Wilayah VII Forum Komunikasi Mahasiswa Tarbiyah Indonesia Timu*. Juni 2000.
- Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Cet. II; Bandung: PT. Remajah Rosdakarya, 2002.
- Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Saridjo, Marwan. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Cet. I; Jakarta: Amisco, 1999.